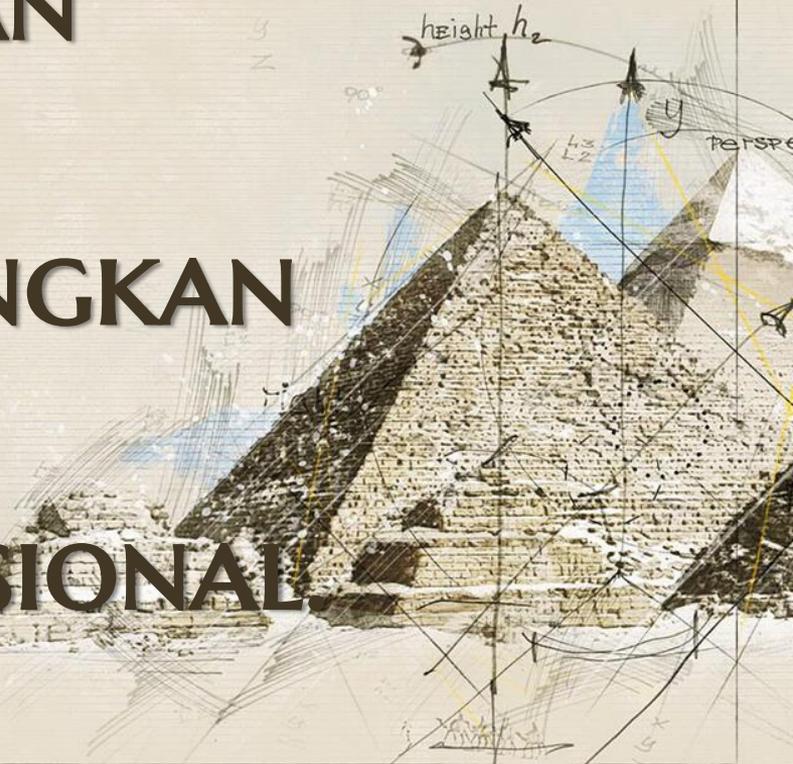


**HAKIKAT PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN
KEMAMPUAN UTUH
SARJANA DAN PROFESIONAL.**



Program Sarjana

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- ◆ Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang Pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- ◆ Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Profesional

- ◆ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- ◆ Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.



Warga Negara

- ◆ Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI?

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

- ◆ Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan kewarganegaraan

- ◆ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).
- ◆ Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara.
- ◆ Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2).

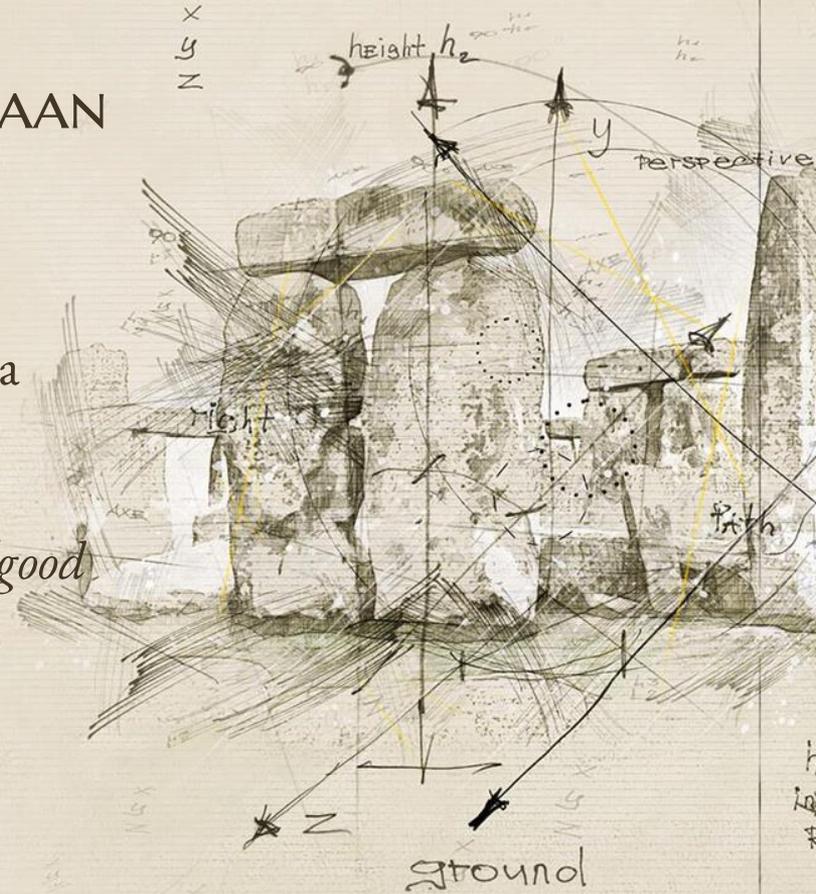


TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- ◆ Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki **rasa kebangsaan dan cinta tanah air.**

(Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37)

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk **warga negara yang baik** (*good citizen*).



KEWARGANEGARAAN

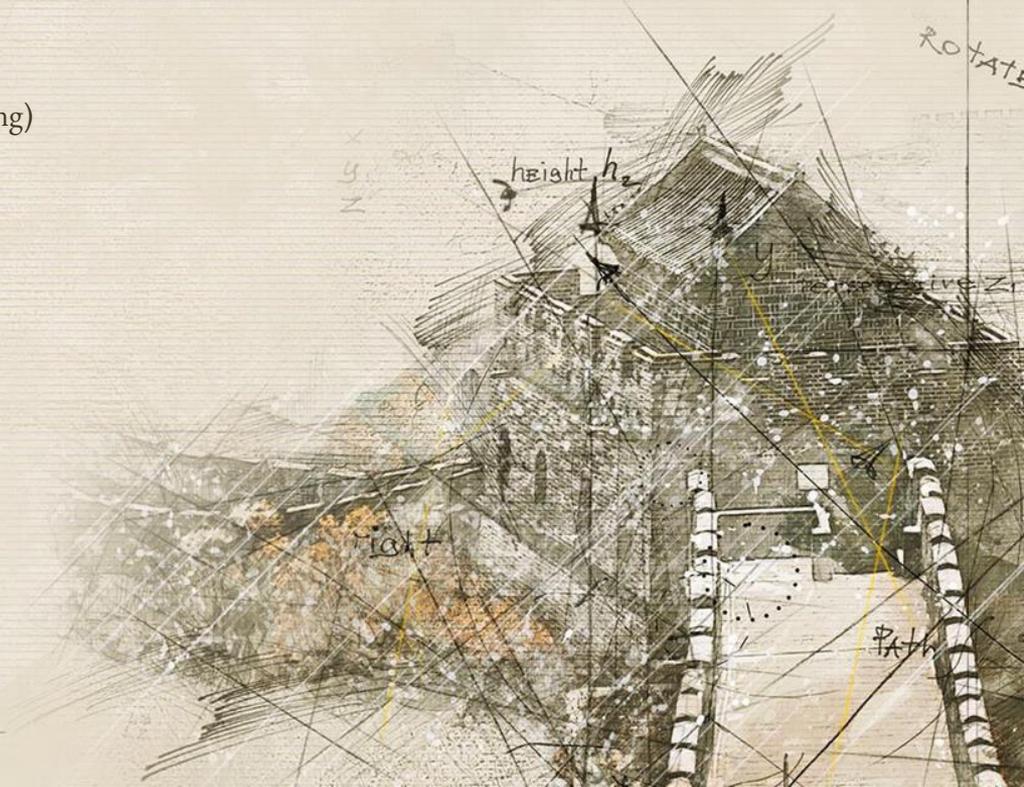
Masih menjadi salah satu
mata kuliah?



- ◆ Kita dapat mencermati Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.
- ◆ Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib.

Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan di negara lain hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapiya (2013) sebagai berikut:

- ◆ Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- ◆ Civics, Civic Education (USA)
- ◆ Citizenship Education (UK)
- ◆ Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timteng)
- ◆ Educacion Civicas (Mexico)
- ◆ Sachunterricht (Jerman)
- ◆ Civics, Social Studies (Australia)
- ◆ Social Studies (USA, New Zealand)
- ◆ Life Orientation (Afrika Selatan)
- ◆ People and Society (Hongaria)
- ◆ Civics and Moral Education (Singapore)
- ◆ Obscesvovedinie (Rusia) □ Pendidikan Sivik (Malaysia)
- ◆ Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)
- ◆ Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekistan).



Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam.

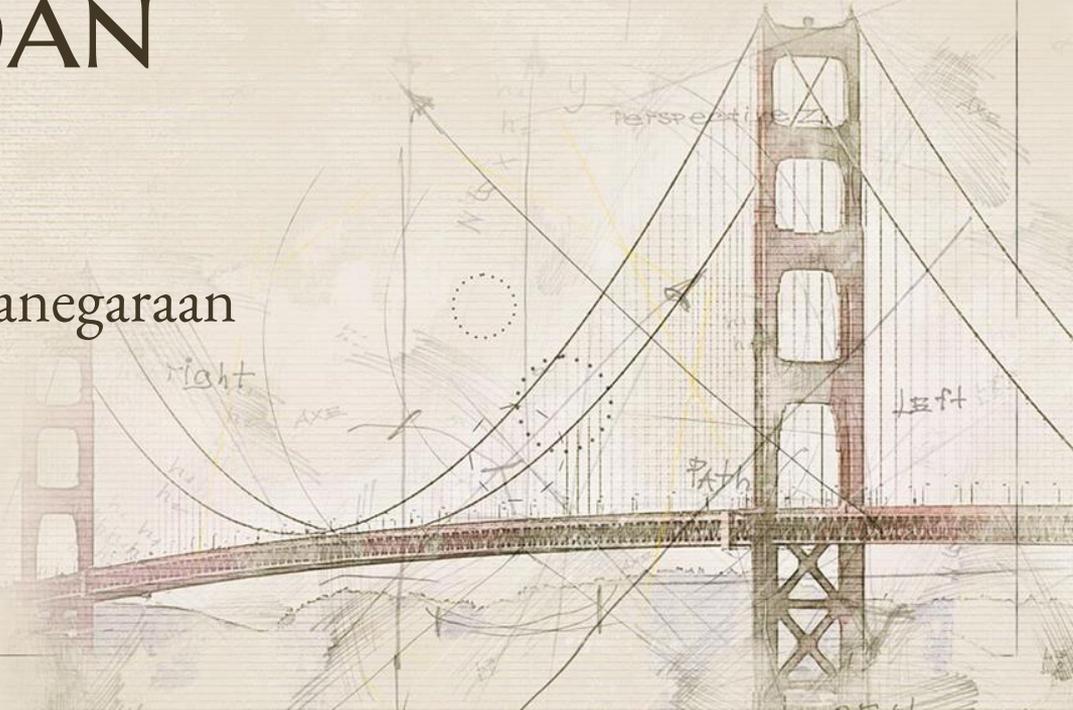
Pertanyaan

- Mengapa khususnya di Indonesia pendidikan kewarganegaraan diperlukan?
- Apa sih nanti dampaknya buat kita?
- Sejak kapan diterapkannya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia?

Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

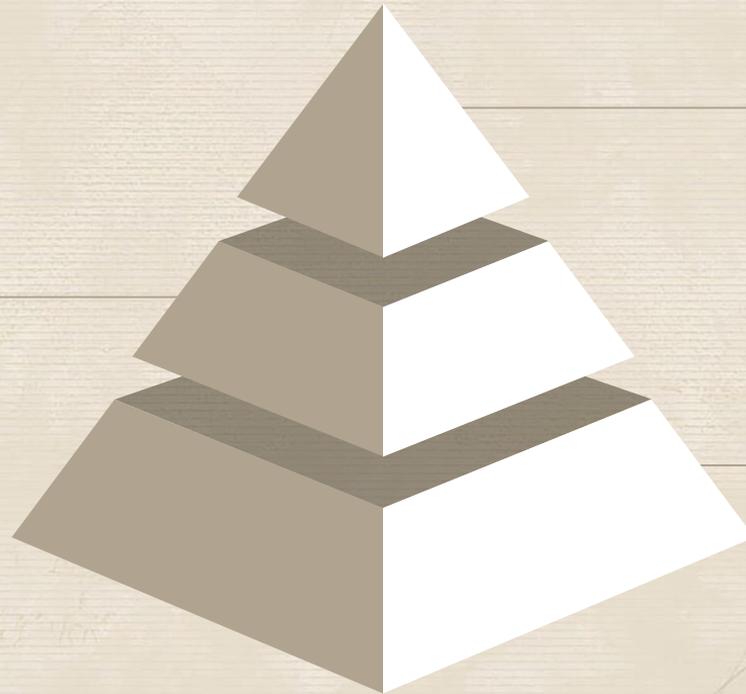
SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS

Tentang Pendidikan Kewarganegaraan
di Indonesia



HISTORIS

**Peristiwa
Sumpah
Pemuda (1928)**



**Boedi Oetomo
① (1908)**

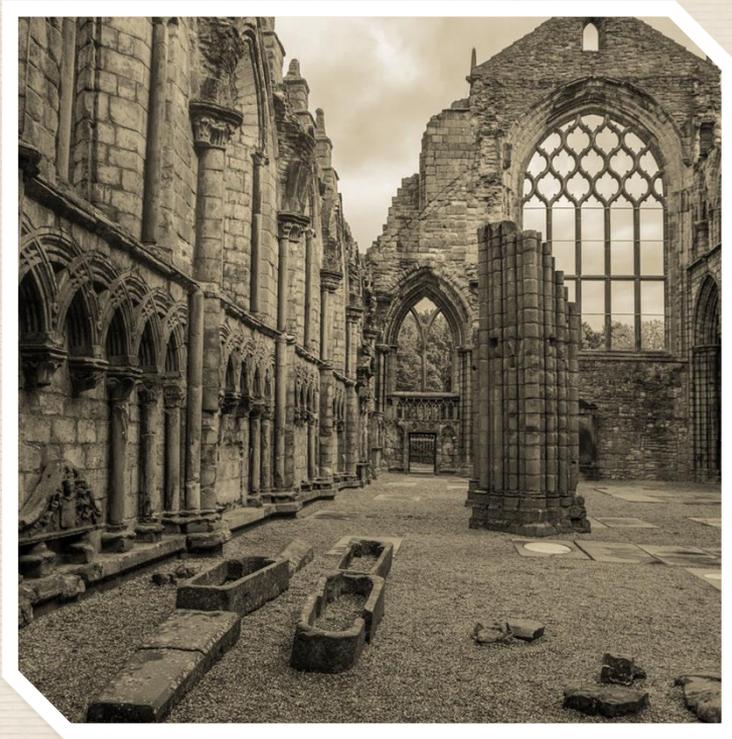
**Proklamasi
Kemerdekaan
Indonesia
③**

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya.

Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

Oleh karena itu...

Diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.



SECARA SOSIOLOGIS.

PKn pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negarabangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

SECARA POLITIS

1. Orde Lama (Di kenal istilah Kewarganegaraan (1957) dan Civics (1962).
2. Orde Baru. Pada awal Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.
3. Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Berubah Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa PMP bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasila.

4. Berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undangundang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn (2006) menjadi mata pelajaran PPKn (2013).

MEMBANGUN ARGUMEN
TENTANG DINAMIKA &
TANTANGAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN



1. Mengapa sistem pendidikan kewarganegaraan berubah ubah?

✓ Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

2. Apa aja sih dinamika yg dihadapi?

✓ Periodisasi perjalanan sejarah mulai dari kemerdekaan

KENAPA PKN ITU BERKAITAN ERAT DENGAN SEJARAH?

Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis.



Mengapa Dinamika dan Tantangan Pkn itu mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (Konstitusi) ?

Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.

- ✓ Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan.
- ✓ Era globalisasi yg mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik.
- ✓ Perilaku warga negara menjadi 2 yakni, positif dan negatif.
- ✓ Pkn perlu mendorong WN agar mampu memanfaatkan pengaruh positif untuk mengembangkan negara
- ✓ Pkn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif.

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka dan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045.

Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan dipersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan.

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%.